

# Polisi dalam Ideologi Demokrasi

Sutrisno\*

*Quid rides? Mutato nomine dete fibula narrates.  
Mengapa tertawa? Kalau namanya diubah,  
maka cerita itu berkisah tentang dirimu.  
(Horat)*



## Abstrak

*Klaim Francis Fukuyama tentang kematian ideologi pada dasarnya sebuah kemenangan materialism-pragmatisme, bukan sekedar liberalisme. Artikel ini menelusuri penyelenggara keamanan dalam arus pusaran kematian ideologi Fukuyama itu. Tata kelola keamanan secara mondial sedang bergeser ke arah privat sebagaimana didikte liberalism. Sulit dihindari hadirnya kegamangan, bagaimana menempatkan polisi pada ruang ideologi baru ini. Perdebatan bahwa polisi tidak dirancang untuk berdemokrasi dalam tugasnya, ia adalah penegak hukum tak pernah selesai. Pendapat yang debatable, apakah benar tidak ada diskusi, kompromi, dan tarwar menarwar dalam melakukan tugas penegakkan hukum. Diskursus yang paling intens nampaknya pada dimensi nilai guna sebagai konsekwensi dari utilitarianisme.*

**Kata Kunci :** *Polisi, demokrasi, ideologi, dan logistik*

## Prolog

Sebagaimana hubungan agama dengan negara di Indonesia, sulit diakui bahwa hubungan polisi dan demokrasi telah mendapat format yang kokoh. Hingga di penghujung tahun 2010-an meski dalam suara sayup terjadi diskusi serius format hubungan dua konsep ini. *Pertama*, arus pemikiran yang hendak mengalamatkan demokratisasi -- *an sich* -- di tubuh kepolisian. Pada poin ini konsep “de-militeristik” dan “de-hirarkhisme” pada institusi kepolisian menjadi *ikon* penting dibicarakan. Tapi kemudian dirasa belum tuntas karena belum menjawab bagaimana mesin organisasi meletakkan aktor-aktornya

dalam kepemilikan otoritas penting di tubuh institusi ini; tentang bagaimana sumber otoritas di tubuh kepolisian ini dikonstruksi layaknya demokrasi di ruang politik. Bagian ini *blunder*, karena bagaimana bisa, misalnya, otoritas (jabatan) di tubuh kepolisian diperoleh melalui seleksi *primus inter pares*. Tetapi, mengapa tidak, ketika instrument pengukur prestasi pada institusi ini juga kabur?<sup>1</sup> Mekanisme yang berjalan,

\* Sutrisno Suki adalah pengajar Sosiologi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta. Beralamat di triznovdi@yahoo.com

1. Berikut adalah pemikiran anekdotik. Munculnya ‘kesholehan’ kalangan polisi berhubungan dengan karut marut-nya system instrumen penilaian. Ketika instrument prestasi tak jelas, maka hanya Tuhan sajalah yang tahu (Yang Maha Penjelas) siapa yang akan ketiban *pulung*. Maka, bagi anggota hanya kepada Tuhan sajalah meminta; (biasanya) melalui shalat dhuha dan puasa. Jadi, ketidakjelasan system (penilaian prestasi) melahirkan personil ‘sholeh’. Ini artinya bila instrumen prestasi ini telah jelas maka Tuhan-pun tidak lagi relevan digauli. Sama halnya salah satu perspektif konstruksi sosiologis atas kelahiran radikalisme agama, bahwa munculnya radikalisme agama berkaitan marjinalisasi pembangunan. Penganut kekerasan berbasis

sumber otoritas di kepolisian terletak pada sebuah elemen organisasi dewan pertimbangan jabatan, kemudian yang paling utama ada restu dari *The Top Manager*.

*Kedua*, hubungan polisi dan demokrasi cukup diletakkan pada wilayah isu netralitas lembaga ini di ruang politik (dan publik). Isu utama adalah kontestasi institusi ini dalam tata kelola kelembagaan negara. Prinsipnya, secara struktural menarik jarak lembaga kepolisian dari otoritas politik untuk menghindari godaan politik. Meletakkan polisi di bawah presiden langsung bukan tak malalui kajian yang serius, meskipun juga tak steril dari godaan politik<sup>2</sup>. Posisi ini tepat; polisi bagian dari eksekutif, meskipun satu kakinya bersifat yudikatif. Posisi polisi dibawah eksekutif akan lebih tepat dibaca bahwa presiden penanggungjawab tertinggi keamanan dalam negeri. Lebih tepatnya, presiden penanggungjawab dinamisasi masyarakat. Polisi bukan hanya bekerja untuk keamanan, tapi juga dinamisasi masyarakat. Dalam bahasa baku kepolisian, tugas polisi bukan hanya menegakkan hukum (represif), tetapi juga preventif dan preemtif. Bukan hanya menangkap, tapi membuat supaya tak ditangkap. Dinamisasi masyarakat bekerjanya roda kesejahteraan dan pertumbuhan budaya / peradaban bangsa. Bekerjanya roda kesejahteraan dan pertumbuhan peradaban mensyaratkan bukan sekedar hadirnya elemen – elemen demokrasi tetapi bekerjanya elemen demokrasi itu secara substansial.

## Sebuah Diskusi

Berikut pada bagian ini adalah ilustrasi kecil tentang realitas hadirnya gejala perbedaan

agama ini tak mempercayai otoritas negara, mereka hanya mempercayai satu hal: Tuhan.

2. Politik masih menjadi ruang seksi. 'Hari gini', ketika segala tolok ukur, termasuk 'kebenarn' ditentukan oleh otoritas politik, manusia mana yang tahan atas godaan mahluk super seksi ini! Sejumlah pengamat mengomentari 'stagnasi' (terobosan) hukum di Indonesia karena presiden justru kokoh berdiri atas nama demokrasi dan penegakkan hukum. Maka, bukankah ini justru dapat dibaca betapa leluasanya gerak aktor politik bekerja di ruang politik. Kegagalan demokrasi adalah justru ketika aktor demokrasi tak mampu menarik garis demarkasi dengan para penjahat demokrasi (Novri Susan, Kompas, 01/08/2011)

tafsir dalam menempatkan dua term, polisi dan demokrasi.

Dalam Forum Discussion Group hasil penelitian bertajuk "Seminar Hasil Penelitian Kopolnas di Tiga Polda (Polda Sumut, Jateng, dan Kaltim) tentang Penerapan Pemolisian Demokratis", 2 November 2008 di Hotel Aryadhuta meletakkan istilah "pemolisian demokratis". Judul seminar ini menjadi materi diskusi yang menyita hampir separuh waktu sepanjang diskusi. Judul penelitian yang terpampang pada spanduk seminar bukan sekedar istilah baru dalam khasanah kepolisian. Oleh beberapa peserta istilah 'pemolisian demokratis' dipandang sebagai telah lepas dari konteks. Padahal penelitian ini diawaki oleh sejumlah mantan pejabat Polri.

Prof. Dr. Bachtiar Ali dan Prof. Sarlito Wirawan yang kerap dipakai sebagai *think-tank* Kapolri berkeberatan dengan penggunaan istilah itu. Alasannya istilah 'Polisi demokratis' tidak dikenal dalam undang-undang no. 2 Tahun 2002. Bagi Bachtiar Ali, polisi tidak dirancang untuk berdemokrasi dalam tugasnya, ia adalah penegak hukum. Tidak ada diskusi, kompromi, dan tawar menawar dalam melakukan tugas penegakkan hukum. Kiprah polisi dalam tugas tak perlu dikaitkan dengan demokrasi. Demokrasi hanya di Senayan, dalam proses pembentukan undang – undang. Ketika hukum dan sejumlah produk hukum terbentuk demokrasi tak lagi ada, yang ada adalah konstestasi antara praktek aparat negara di satu sisi yang diamanatkan menjaga kewibawaan hukum dan negara dengan melanggar hukum. Hukum itu betatapun bopeng wajahnya bagi polisi hanya wajib bertugas mengamankannya.

Agaknya paralel dengan Prof. Muladi, mantan pensehat Kapolri, dalam orasi ilmiahnya di PTIK, 17 Juni 2006, menegaskan bahwa polisi dalam mengendalikan ketertiban masyarakat mendayagunakan formasi paramiliter. Yaitu

bergerak bersama dalam kesatuan dan harus taat pada perintah komandan. Namun karena tugas utama polisi adalah melindungi orang, bukan membunuhnya, menerapkan budaya militer murni pun tidak terlalu kena. Dalam masyarakat demokratis masih didiskusikan persoalan langkah-langkah pemolisian (*the goal of policing*). Muladi merujuk Henry Wroblewski dan Karen Hess (2006), paling tidak langkah – langkah pemolisian dalam masyarakat demokratis, secara tradisional adalah;

- a) penegakkan hukum (*inforce laws*);
- b) menjaga suasana kedamaian (*preserve peace*);
- c) mencegah kejahatan (*prevent crimes*);
- d) melindungi hak – hak dan kebebasan individu (*protect civil right and civil liberties*);
- e) menyelenggarakan pelayanan (*provide service*).

Namun kemudian perkembangannya mengikuti kontekstualitas masyarakat / negara, sehingga “*community policing*” menjadi konsep penting dalam pelaksanaan program pemolisian itu. Dua tujuan penting dalam konsep ini adalah menciptakan kemitraan dengan masyarakat (*forming partnership with the community*), dan penerapan pendekatan proaktif dalam memecahkan masalah kejahatan, rasa takut terhadap kejahatan dan pencegahan kejahatan.

Wacana polisi dalam demokrasi dari uraian Muladi lebih terletak pada penekanan pendekatan (tugas) polisi dalam realisasinya dengan masyarakat. Tidak lagi menempatkan masyarakat sebagai obyek, dimana polisi secara superior mendefinisikan secara otonom segala hal ikhwal kejahatan (*crime*) dan ketertiban (*order*) di tengah masyarakat. Bukan “*negotiable*” soal kejahatan yang sudah jelas dipatri dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, seperti yang dikhawatirkan Bachtiar Ali, bukan di sini ruang polisi dalam demokrasi.

Momo Kelana (almarhum; salah satu purnawirawan Polri yang tidak bisa diam ketika melihat Polri dipersoalkan), ketua peneliti dari LCKI berpandangan pemolisian demokratis mengatasi *term* pemolisian masyarakat. Diskusi istilah ‘pemolisian demokratis’ ini menunjukkan dua kemungkinan gejala. *Pertama*, adanya *simpang siur* di sejumlah kalangan *opinion leader* (elit kepolisian dan kalangan umum-akademik) terhadap realitas gagasan sejauh mana kompatibilitas (*compatibility*) demokrasi di tubuh kepolisian. *Kedua*, bagaimana menempatkan polisi dalam tatanan demokrasi. Poin kedua ini menyangkut persinggungannya dengan masyarakat, pada level ini tidak terlalu memakan energy perdebatan di dalam tubuh kepolisian. Konsep ‘polisi sipil’ yang dengan getol digeluti Prof. Satjipto Rahardjo nampaknya tidak cukup menyelesaikan pertanyaan dilematik poin kedua ini. Polisi dalam negara demokrasi (memang) harus sipil –sebagaimana dikontestasikan dengan entitas militer – namun sesungguhnya tidak pula sepenuhnya entitas sipil kalau menggunakan kerangka pikir Bachtiar Ali. Kerja keras Polri membangun citra itu.

### **Logistik, Ideologi dan Rasa Aman; Sebuah penjelajahan ‘teologi’**

Sejumlah begawan di atas mencoba “meluruskan” gagasan dasar yang terkandung pada judul diskusi “Pemolisian Demokratis”. Bahwa, prinsipnya tak ada ruang demokrasi dalam tugas penegakan hukum. Sejumlah begawan ini menyandarkan pandangannya pada deontologis Imanuel Kant. Bagi Kant, yang baik adalah yang melakukan kewajiban. Rumusan kewajiban adalah norma yang tertulis. Seorang polisi tak bisa dibenarkan melepas seorang ibu tua yang menilep sekaleng susu bubuk anak yang dilaporkan seorang penjaga swalayan. Hukum tak perlu kompromi. Mengkompromikan hukum, kemudian membengkokkannya dalam deontologi dipandang sebagai *hiteronom*.

Dalam kisah nyata ini sang polisi memberikan uang pengganti seharga susu itu kepada pelapor dan kasus dianggap selesai. Ia tak membaca deontologi Kant, ia hanya mempercayai suara langit. Suara dari langit ini pada ghalibnya mendapatkan restu legitimasi dalam sistem moral eudomonia Aristoteles. *Quod justum, non quod utile*; harus dibedakan apa yang adil, bukan yang berguna.<sup>3</sup> Akhirnya, *nercis, mi fili, quantilla prudential mundus regatur*; anakku, engkau tidak tahu bahwa dunia ini diatur oleh kearifan – kearifan kecil.

Walapun terkesan asal-asalan namun bukan tanpa dasar argumen yang kokoh bahwa polisi mustinya tidak terikat ideologi dunia, apakah itu ideologi bernama demokrasi, komunisme, stalinisme, feodalisme, islam (Islam Arab atau Islam Jawa<sup>4</sup>), dan Pancasila sekalipun. *Should be assumed as if no ideologi in the police operating*. Ia bekerja pada ruang yang mengasumsikan hampa ideologi kecuali hanya terikat pada ideologi kemanusiaan. Penjelasannya sederhana, bahwa kebutuhan subyek atas keamanan tidak dibedakan menurut ideologinya.

Karena prinsipnya rasa aman dan takut sepenuhnya menyangkut bekerjanya hormon adrenalin; bukan pada faham ideologi yang dianut. Dan, polisi adalah mahluk di muka bumi yang paling bertanggungjawab atas (rasa) aman dan takut. Aman memang bukan segalanya, tapi tanpa rasa aman segalanya tak berarti. Hormon Adrenalin<sup>5</sup> lebih bisa “bicara” sebagai petunjuk

awal untuk melakukan intervensi negara secara diskriminatif ketimbang faham ideologi yang dianut manusia. Hormon pemicu detak jantung ini secara sosial berlokasi pada kelompok teraniaya. *Nihil est incertius vulgo*, ujar Cicero, tidak ada yang lebih tidak pasti daripada sebagai rakyat jelata.

Belakangan ditemukan informasi baru. Bahwa, ternyata rasa cemas dan ketakutan juga berhubungan dengan volume otak seorang/ekor mahluk. Bandingkan, misalnya, ukuran otak manusia *Homo Sapiens* 1.300 – 1.500 cc; *Australopithecus*, nenek moyang kita yang hidup 4 juta sampai 3 juta tahun yang lalu ukuran otaknya 375 – 500 cc; ke belakang lagi, *Sahelanthropus tchadensis* hidup sekitar 7 juta tahun silam ukuran otaknya cuma 340 – 360 cc. (*Koran Tempo*, 4/8/2011). Postur tubuh dan muka *Australopithecus* dan *Sahelanthropus tchadensis* masih menyerupai simpanse, volume otaknya tak melebihi simpanse. Evolusi volume otak ini berkaitan dengan evolusi kerumitan berbahasa. Otomatis, perkembangan bahasa itu sendiri menandai kompleksitas tata hidup sosial. Konsep “Tuhan” hadir bersama kompleksitas bahasa, dan “Tuhan” mulai menciptakan ketakutan-ketakutan. *Primus in orbe deos fecit timor*, ketakutan adalah yang pertama kali diciptakan oleh para dewa (Status). Jadi prinsipnya faktor kecemasan pada mahluk ber-otak besar bukan hanya pada derajat fisik, atau perihal yang mengancam fisik sebagaimana pada mahluk berotak kecil, tapi tentu juga menyangkut sosial dan psikologis (budaya).

Faktor pemicu kecemasan-pun menjadi kompleks. Dalam istilah Emile Durkheim, manusia mulai takut pada gagasan yang ia ciptakan sendiri (“Tuhan”). Ini penting untuk sekedar catatan, bahwa variable keamanan juga ber-evolusi dalam jutaan tahun. Ketika

yang memicu reaksi terhadap tekanan dan kecepatan gerak tubuh. Tidak hanya gerak, hormon ini pun memicu reaksi terhadap efek lingkungan. Reaksi yang kita sering rasakan adalah frekuensi detak jantung meningkat, keringat dingin dan keterkejutan.

3. Pepatah ini diangkat Aristoteles ketika mendiskusikan substansi keadilan dalam hukum. Dan, kemudian menjadi kritik bagi praktisi hukum yang mengabaikan virtue keutamaan. Dalam konteks hari ini virtue semacam ini akan sulit difahami tanpa menghubungkannya dengan potret sosiologi hukum yang lebih luas. Misalnya, sulit melekatkan penilaian moral bagi kelompok kemiskinan struktural. Menjadi rumit apakah korban atau pelaku kejahatan. *Quid leges sine moribus?*, Apakah undang-undang dapat berjalan tanpa moral?

4. “Islam Arab” dalam wacana teologi (hampir) disepadankan dengan anti-sinkretisme, mungkin agak mendekati dengan Salafiyah, Wahabiyah. “Islam Jawa” atau Abangan adalah bentuk pengakuan adanya kebenaran “di luar” Arab. Catatan ini perlu karena sepanjang sejarah Bangsa Indonesia mencurahkan energy pada perdebatan semacam ini. Apa yang dikatakan ‘kebenaran’ harus direfer pada apa yang dikatakan oleh Tuhan-nya masing-masing. Konon, Cina, Amerika, Jepang malaju cepat karena tidak harus dihadapkan pada persoalan tafsir tentang apa maunya Tuhan, sehingga wujud Kemanusiaan memungkinkan ditafsir secara tunggal. Disana diskusi tentang Tuhan sudah selesai.

5. Wikipedia menyebut Adrenalin (*adrenaline, epinephrine*) sebagai hormon

evolusi diyakini berhenti pada Homo Sapiens, sesungguhnya yang dimaksud adalah evolusi fisik, sementara evolusi non fisik masih terus bergerak. Bukankah, “Tuhan” sebagai buah pemikiran manusia itu sendiri ber-evolusi seperti ditulis Karen Amstrong. Agama (=Tuhan) yang memungkinkan berdamai dengan masa depan yang aman adalah yang tidak pernah “memutlakkan kebenaran”, yang berdialog.

Dalam masyarakat modern, polisi -- terlepas ia lahir dari rahim masyarakat atau rahim kekuasaan -- adalah profesi yang “didalam dirinya sendiri” paling akrab dengan materi adrenalin ini. Atau, entitas yang paling relevan berurusan dengan perihal ketakutan. Dalam masyarakat modern Mengidentifikasi rasa takut caranya mudah, bila komunitas manusia lebih cepat gerak adrenalinnya dibandingkan dengan komunitas yang lain, polisi harus segera hadir dan menawarkan pelayanan, “*what can I do for you, Sir?*”. Etika kepolisian mengharamkan bertanya kepada *si* subyek keamanan, “*Are you moslem?*”, atau “*you looks Chinese, Sir*”. Penulis yakin seratus persen tak ada (anggota) polisi yang menanyakan pertanyaan kedua dan komentar ketiga itu dalam memberikan pelayanan, kecuali (barakangali) kalau orang semacam Amrozi, Imam Samodra, Dulmatin, Ustad Abu yang jadi polisi.

Namun persoalannya justru bukan pada diskriminasi ideologi. Format kematian ideologi sebagaimana disinyalir Fukuyama, bahwa manusia tidak lagi bisa diagregatkan menurut kelompok ideologi (*Ya, karena memang ideologi sudah dianggap mati!*). Gerakan sosial, gerakan politik, demonstrasi, dan lain-lain tidak lagi digerakkan oleh etos ideologi. Kapitalisme dan sosialisme sebagai ideologi, pada hari ini hanyalah sebuah kontestasi wacana tentang bentuk manipulasi kelas ekonomi, sebagaimana disinyalir Karl Marx. Dalam kerangka ini kematian ideologi tidak jauh berbeda dengan ruang kembalinya prinsip-prinsip dasar gagasan Marx. Ketika ideologi mati yang tinggal

hanyalah materi. Prinsip teologik yang ingin dikatakannya, ‘manusia adalah seonggok daging yang digerakkan oleh materi’.

Term ‘ideologi’ hampir kehilangan relevansi untuk memotret perilaku politik pada hari ini. Pada level mondial dalam mengomentari posisi Indonesia, R. William Liddle Profesor Emertius dari Universitas Ohio State, menulis bahwa ancaman politik yang dihadapi Indonesia berasal dari kiri<sup>6</sup>. Yang dimaksud adalah perilaku politik dalam bentuk tututan populis dan anti-global. Kalau Liddle betul, ancaman ini berasal dari gejolak dalam negeri. Pembelaan para penganut pasar bebas mendaku bahwa ideologi kiri (kalau itu ada) adalah utopis; tidak natural, bahkan merampas keadilan itu sendiri. Persoalan etik yang sering dikemukakan dalam pembelaan gagasannya, “*manajalan kemoralitas: memaksa atau membujuk?*”; “*mana jalan menuju kesejahteraan: perampasan atau mengakui kepemilikan?*”<sup>7</sup> Bagi kalangan masyarakat kental beragama – seperti Indonesia – pilihan jawaban atas pertanyaan itu dicari legitimasinya dari kitab suci; *Quod vult Deus*, apa yang dikatakan Tuhan tentang dua pilihan itu. Tahun 1980-an kalangan muda muslim di kampus – kampus mendiskusikan perihal apakah Muhammad SAW lebih cenderung pada gerakan kiri atau kanan? Atau, apakah Muhammad SAW itu sosialis atau kapitalis? Pertanyaan yang sama bisa dialamatkan kepada Pancasila. Dalam sebuah garis bilangan dimana titik netralnya “0” (titik nol), maka jawaban yang “aman” meletakkan Muhammad SAW dan juga Pancasila pada titik nol itu. Pada praksisnya di panggung sejarah Pancasila bisa ditarik ke kiri dan ke kanan, begitu juga Muhammad SAW.

Kembali ke Liddle. Disini, dalam artikel kecil ini Liddle memuji sejumlah presiden Indonesia pasca Orde Baru bahwa mereka mampu mempertahankan garis kebijakan

6. Harian Kompas, 10 Agustus 2011.

7. Lihat, misalnya Frederic Bastiat, sebuah buku pegangan penting bagi kalangan pengajar liberalism – kapitalisme yang kembali diterbitkan dari judul asli “*The Law*” melalui Freedom Institute tahun 2010.

ekonomi pro pasar. Maka, arus pro-pasar *versus* tuntutan popilis pada ghalibnya mendekatkan keberlakuan pemikiran Marx tentang kelas tadi. Dua arus yang saling berbenturan ini mempuyai identitas lokasi sosial dalam kerangka kelas, atau paling tidak formasi stratifikasi.

Ketika ideologi sudah bubar, maka tindakan manusia -- tentu juga termasuk mahluk bernama polisi -- tidak lagi dikontrol oleh ideologi, tetapi oleh materi. Kematian ideologi sebagaimana dianulir Fukuyama hanya mempunyai kompatibilitas dalam sistem moral utilitarian. Atau, matinya ideologi ini bersamaan dengan bangkrutnya sistem filsafat moral eudomonia ke sistem filsafat utilitarian. Rumus kode moralnya; yang baik adalah yang mempunyai nilai guna. Nilai guna menjadi dimensi yang cenderung rumit dipegangi benang merahnya. Apakah rasa keamanan memang merupakan fungsi dari kecukupan logistik, dipandang sebagai realitas yang normal, misalnya. Jika jawabannya negative ("tidak"); apakah fakta sosiologis tentang fungsi logistik bagi rasa aman adalah etis untuk meletakkan legitimasi moral? Ini persoalan etika pelayan keamanan yang maha sulit dielaborasi begitu saja.

Elaborasi yang dipaksakan dalam menjawab persoalan ini tidak jauh dari logika analitik pada derajat rasa aman. Elaborasi ini tak lain memandang prinsip natural tentang hak milik berkaitan dengan kebebasan; ketika hak milik dipandang sebagai azasi maka rasa aman mengikuti kepemilikan secara gradatif. Yang dimaksud nilai guna hampir sulit dilepaskan dari kerangka material. Maka disini jangan bicara soal kemuliaan, kebanggaan, kekuatan, keberanian jika tanpa logistik yang cukup.

Keamanan dan rasa aman akan selalu menyangkut persoalan logistik. Sistem sosial manusia pada era ini kembali pada era *Australopithecus*. Era nenek moyang kita yang hidup 4 juta sampai 3 juta tahun yang lalu

dimana ukuran otaknya cuma 375 – 500 cc. Pada era *Australopithecus* rasa aman hanya bila ada timbunan makanan dengan pintu gua yang kokoh. Untuk 'membeli' keamanan pada hari ini, tata kelola keamanan akan segera hadir melalui undangan logistik yang cukup.

## Penutup

Terlepas dari pro kontra terhadap kematian ideologi yang didengungkan Fukuyama, gelagatnya pada tata kelola sosial secara mondial Fukuyama tak dapat disangkal. Dalam bahasa yang vulgar kematian ideologi artinya tak relevan lagi bicara ideologi. Cara ini mendekatkan pada utilitarianisme. Dan, hari ini, diskursus yang paling intens nampaknya pada dimensi nilai guna sebagai konsekwensi dari utilitarianisme. Moral tak segera mendapatkan posisi yang jelas bagi penegak hukum karena harus dedefinisikan pada nilai guna, nilai skriptual deontology, dan sekaligus *virtue*-nya Aristoteles. Jika nilai moral yang rumit ini dipandang sebagai sebuah kemewahan diskusi maka penarikan kesimpulan *sine qua non* terletak pada nilai guna. Moral akhirnya terletak pada sesuatu yang bisa memberikan nilai guna bagi publik. Hukum - hukum kuantifikasi menjadi penting untuk mengidentifikasi apa benar yang disebut publik.

Dan, tentu, term publik tak steril dari teknik manipulatif statistik. Sebagaimana keamanan juga menjadi komoditas. Artinya, keamanan menjadi barang privat. Akibat mengerikan pada tarap kronis adalah institusi hukum tak sadar telah ter-privatisasi. Pada taraf ini rasa aman berbanding lurus dengan besarnya logistik. Peradaban manusia kembali pada 3 juta tahun yang lalu ketika ukuran otaknya hanya sebesar ukuran otak simpanse, 375 – 500 cc.

*Omnia fert aetas, animumquoque*, waktu menggerogoti segalanya, juga semangat rohani kita. (\*\*\*)